



**PENGARUH KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
TERHADAP KONSUMSI *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* (LPG)
DI KABUPATEN INDRAMAYU**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Ekonomi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

Anggi Ratoe Bachtiar
NIM 050810101055

**ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2009**

Pengaruh Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
terhadap Konsumsi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG)
di Kabupaten Indramayu

Anggi Ratoe Bachtiar

Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat harga minyak tanah, pendapatan, dan tingkat harga LPG terhadap konsumsi LPG di Kabupaten Indramayu. Penelitian ini menggunakan metode Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat harga minyak tanah (DM) memiliki nilai probabilitas t-statistik sebesar 0,0559, dan pendapatan (LX2) memiliki nilai probabilitas t-statistik sebesar 0,0461 artinya bahwa nilai probabilitas t-statistik lebih kecil dari $\alpha = 0,1$ atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap konsumsi LPG di Kabupaten Indramayu, dan tingkat harga LPG (LX3) memiliki nilai probabilitas t-statistik 0,1902 lebih besar dari $\alpha = 0,1$ atau tidak mempunyai pengaruh terhadap konsumsi LPG di Kabupaten Indramayu. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama tingkat harga minyak tanah, pendapatan, dan tingkat harga LPG mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap konsumsi LPG di Kabupaten Indramayu sebelum dan setelah kenaikan harga BBM dan ada faktor lain yang mempengaruhinya serta ada perbedaan yang nyata antara konsumsi LPG di Kabupaten Indramayu sebelum dan setelah kenaikan harga BBM.

Kata kunci : *tingkat harga minyak tanah, pendapatan, dan tingkat harga LPG.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
ABSTRAKSI	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1.3.1 Tujuan Penelitian	10
1.3.2 Kegunaan Penelitian	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Teori Permintaan.....	11
2.1.2 Gerakan Sepanjang Kurva Permintaan dan Pergeseran Kurva Permintaan	14
2.1.3 Teori Penawaran	16

2.1.4 Gerakan Sepanjang Kurva Penawaran dan Pergeseran	
Kurva Penawaran.....	19
2.1.5 Keseimbangan Pasar	21
2.1.6 Elastisitas Permintaan dan Penawaran.....	23
2.1.7 Teori Konsumsi.....	28
2.1.8 Garis Anggaran (<i>budget line</i>).....	32
2.1.9 Efek Substitusi dan Efek Pendapatan	32
2.1.10 Teori Produksi	37
2.1.11 Teori Biaya Produksi	40
2.1.12 Hubungan antara Biaya dengan Produksi	45
2.1.13 Hubungan Tingkat Harga Minyak Tanah dengan Konsumsi.....	46
2.1.14 Hubungan Pendapatan dengan Konsumsi.....	46
2.1.15 Hubungan Tingkat Harga LPG dengan Konsumsi	47
2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya	48
2.3 Kerangka Berfikir	49
2.4 Hipotesis.....	50
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	51
3.2 Populasi.....	51
3.3 Sampel	51
3.4 Jenis dan Sumber Data	53
3.5 Metode Pengumpulan Data	53
3.6 Metode Analisis Data.....	54
3.6.1 Analisis Regresi Berganda	54
3.6.2 Uji Statistik	54
3.6.3 Uji Ekonometrika	57
3.7 Definisi Variabel Operasional dan Skala Pengukuran	60

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Indramayu.....	62
4.1.1 Letak dan Keadaan Geografis Kabupaten Indramayu.....	62
4.1.2 Keadaan Penduduk	62
4.1.3 Mata Pencaharian Penduduk	63
4.1.4 Kondisi Perekonomian Kabupaten Indramayu.....	66
4.2 Gambaran Umum <i>Liquefied Petroleum Gas</i> (LPG)	67
4.2.1 Pengertian <i>Liquefied Petroleum Gas</i> (LPG).....	67
4.2.2 Karakteristik Umum <i>Liquefied Petroleum Gas</i> (LPG).....	68
4.2.3 Kegunaan <i>Liquefied Petroleum Gas</i> (LPG)	69
4.2.4 Lingkup Distribusi/Penyaluran <i>Liquefied Petroleum Gas</i> (LPG)	70
4.2.5 Mekanisme Pelaksanaan Program Konversi LPG.....	71
4.3 Analisis Data.....	79
4.3.1 Analisis Data Penelitian	79
4.3.2 Hasil Uji Statisitik.....	79
4.3.3 Hasil Uji Ekonometrika	81
4.4 Pembahasan.....	82
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	88
5.2 Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	L
LAMPIRAN	L1-L12

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1	Kondisi Perminyakan di Indonesia Tahun 2000-2004..... 4
1.2	Subsidi BBM dan LPG RAPBN-P 2008 7
4.1	Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kab. Indramayu Tahun 2006-2007 ... 63
4.2	PDRB Kabupaten Indramayu atas Dasar Harga Berlaku dengan Harga Migas Tahun 2006-2007 66
4.3	PDRB Kabupaten Indramayu atas Dasar Harga Konstan dengan Harga Migas Tahun 2006-2007 67
4.4	Road Map Program Konversi Minyak Tanah ke LPG..... 73
4.5	Keuntungan Konsumen dalam menggunakan LPG 3 Kg 75
4.6	Harga Jual LPG Kemasan 6 Kg, 12 Kg, dan 50 Kg sebelum Kenaikan76
4.7	Harga Jual LPG setelah Kenaikan 77
4.8	Hasil Uji Statistik secara Parsial (uji t) 80
4.9	Hasil Uji Heteroskedastisitas 82
4.10	Hasil Uji Autokorelasi 82

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kurva Permintaan Minyak Tanah pada Berbagai Tingka Harga.....	12
2.2 Kurva Permintaan Individu dan Kurva Permintaan Pasar	13
2.3 Kurva Gerakan Sepanjang dan Pergeseran Kuva Permintaan	15
2.4 Kurva Pergeseran Permintaan Agregat dan Penawaran Agregat	16
2.5 Kurva Penawaran Minyak Tanah.....	18
2.6 Kurva Penawaran Individu dan Kurva Penawaran Agregat	19
2.7 Kurva Gerakan Sepanjang dan Pergeseran Kurva Penawaran.....	20
2.8 Keseimbangan Pasar	21
2.9 Kurva Keseimbangan Penawaran dan Permintaan Agregat	22
2.10 Kurva Elastisitas Permintaan	24
2.11 Kurva Elastisitas Penawaran.....	28
2.12 Kurva Konsumsi	30
2.13 Kurva Konsumsi Agregat	31
2.14 Garis Anggaran Konsumen.....	32
2.15 Pergeseran <i>Budget Line</i> untuk Barang X akibat Perubahan Harganya. 33	33
2.16 Pergeseran <i>Budget Line</i> untuk Barang Y akibat Perubahan Harganya 34	34
2.17 Perubahan Pendapatan, Harga Barang Y & X Tetap.....	35
2.18 Efek Substitusi & Efek Pendapatan	36
2.19 Kurva Produksi Jangka Pendek	39
2.20 Kurva Biaya Tetap	41
2.21 Kurva Biaya Variabel	42
2.22 Kurva Biaya Total.....	42
2.23 Kurva Biaya Tetap Rata-rata.....	43
2.24 Kurva Biaya Variabel Rata-rata.....	43
2.25 Kurva Biaya Marginal	44

2.26	Kurva Biaya Rata-rata.....	44
2.27	Kurva yang Makin Berkurang dan Kurva Biaya yang Berbentuk U	45
2.28	Kerangka Berfikir	49
3.1	Uji Durbin Watson.....	60
4.1	Jalur Distribusi LPG 3 Kg.....	73
4.2	Pembagian Paket Kompor Gas dan Tabung LPG 3 Kg.....	74
4.3	Kurva <i>Demand</i> Inelastis.....	84
4.4	Kurva Perbandingan TR karena Kenaikan Harga SDA.....	85

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN.....	L
Lampiran A Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	L1
Lampiran B Unit Root Test pada Tingkat Produksi LY	L2
Lampiran C Unit Root Test Pendapatan LX2.....	L3
Lampiran D Unit Root Test Konsumsi LPG LX3	L4
Lampiran E Uji Heteroskedastisitas.....	L5
Lampiran F Uji Autokorelasi	L6
Lampiran G Uji Multikolinearitas	L7
Lampiran H Rata-Rata Produksi LPG, Pendapatan, dan tingkat harga LPG di Kabupaten Indramayu	L8
Lampiran I Surat Ijin Penelitian BAKESBANG Surabaya	L9
Lampiran J Surat Ijin Penelitian BAKESBANG Bandung.....	L10
Lampiran K Surat Ijin Penelitian BAKESBANG Indramayu	L11

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kenaikan harga minyak dunia menjadi tantangan berat bagi perekonomian nasional. Mengawali tahun 2008 harga minyak dunia mencapai angka 100 dollar AS per barel dan akan terus naik (Huda, 2008:1). Hal ini menjadi masalah tersendiri bagi negara-negara berkembang terutama negara-negara pengimpor minyak. Padahal menurut OPEC, jumlah permintaan dan produksi dunia tidak ada perubahan yang signifikan tetapi harga mengalami kenaikan yang luar biasa berbeda dengan komoditas lain, yang sangat banyak faktor ekonomi dan non ekonomi yang akan mempengaruhi tingkat harga dari sumber energi alam ini. Tidak hanya melonjaknya permintaan energi di berbagai negara industri, tetapi perkembangan politik luar negeri berbagai negara maju justru lebih mempengaruhi harga komoditas minyak. Dengan komoditas seperti ini, diprediksi harga minyak mentah akan sulit untuk kembali pada kisaran 60-65 dollar AS per barel. Turbulensi ekonomi tidak bisa dihindarkan lagi, kenaikan harga minyak secara langsung akan meningkatkan biaya produksi barang dan jasa serta beban hidup masyarakat dan pada akhirnya akan memperlemah pertumbuhan ekonomi dunia (Dartanto, 2005:1).

Terdapat empat faktor yang mempengaruhi kenaikan harga minyak dunia yaitu :

1. ketidakstabilan ekonomi yang terjadi di negara-negara maju yang notebene merupakan induk perputaran roda industri dan perdagangan dunia. Terjadinya krisis dan skandal keuangan di beberapa perusahaan-perusahaan besar di Amerika seperti : Enron (Perusahaan Listrik terbesar ke-2), Xerox (Perusahaan Industri Penghasil Mesin Cetak terbesar), Iclome (Perusahaan Farmasi) dll, jelas bahwa telah terjadi colaps ekonomi di negara tersebut. Salah satu fakta, bahwa krisis di negara-negara maju terutama Amerika tengah berlangsung adalah dikeluarkannya kebijakan ekonomi-politik represif, yaitu invasi dan perang di Afganistan dan Irak. Ini

merupakan bukti nyata bahwa mereka ingin menguasai perekonomian dunia dengan kedok terorisme;

2. ketidakstabilan politik di negara-negara penghasil minyak, terutama di Daratan Timur Tengah. Hal ini juga diakibatkan oleh agresi militer serta tekanan politik dari negara-negara maju yang dipelopori oleh Amerika Serikat;
3. faktor musim dan aksi borong minyak dari negara-negara industri baru. Faktor musim dingin yang terjadi di benua Amerika dan Eropa akan memaksa negara-negara tersebut menambah cadangan persediaan minyaknya untuk menghadapi musim dingin yang akan berlangsung lama. Ditambah lagi badai yang terus berlangsung di Teluk Meksiko beberapa tahun terakhir;
4. terakhir, dipicu oleh aksi borong dan monopoli transaksi pembelian yang dilakukan oleh negara-negara yang berkembang pesat seperti Cina dan India.

Dengan melihat kondisi di atas, kenaikan harga minyak dunia menjadi petaka tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Pada kenyataannya Indonesia dikenal sebagai salah satu penghasil minyak dunia, namun sekarang menjadi negara pengimpor minyak. Kenaikan harga minyak dunia yang cukup tajam tentunya akan mempengaruhi pola energi dan pola konsumsi di negara-negara yang cukup besar (Dartanto, 2005:1).

Pengaruh ini akan relatif lebih besar terhadap anggaran dari sisi penerimaan dan pengeluaran dalam APBN tahun 2008. Apabila kenaikan harga BBM bersubsidi tetap dipertahankan maka akan terjadi lonjakan subsidi BBM. Tentunya hal ini akan mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran rutin serta pembangunan yang terdiri dari bantuan proyek dan bantuan program (Udiyana, 2008:2). Tidak tercapainya efisiensi energi pada penggunaannya dan tidak ada pengembangan serta penerapan energi alternatif seperti Indonesia, kenaikan ini akan meningkatkan beban anggaran pos subsidi BBM dan pada akhirnya akan meningkatkan defisit APBN. Akan tetapi dampak ini tidak terlalu besar karena sejak tahun 2005 subsidi BBM untuk solar dan bensin sudah sebagian besar dihapuskan dan yang masih disubsidi dengan cukup besar adalah minyak tanah (Sirait, 2007:1).

Minyak dan fluktuasi harga memberikan pengaruh yang cukup vital pada hampir semua aktivitas makro ekonomi, karena minyak merupakan salah satu energi utama yang digunakan baik secara langsung dan tidak langsung dalam memproduksi barang dan jasa. Minyak menjadi energi teratas penggunaan untuk menopang proses produksi dibandingkan dengan sumber energi lainnya, sehingga fluktuasi harga minyak sangat sensitif dengan kondisi perekonomian di suatu negara. Apabila kenaikan harga minyak ini terus terjadi tanpa melakukan terobosan-terobosan untuk mencari alternatif energi lain atau penghematan energi melalui efisiensi penggunaan energi, maka mesin-mesin produksi terpaksa digilir atau bahkan bisa mati untuk selamanya, sehingga bertambahnya angka pengangguran dan angka kemiskinan menjadi efeknya (Sirait, 2007:1).

Cadangan minyak di Indonesia pada tahun 1974 sebesar 15.000 metrik barel dan terus menerus mengalami penurunan, pada tahun 2000, cadangan minyak Indonesia sekitar 5123 metrik barel dan tahun 2004 menjadi sekitar 4301 metrik barel. Penurunan cadangan minyak disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu eksploitasi minyak selama bertahun-tahun dan minimnya eksplorasi atau survei geologi untuk menemukan cadangan minyak baru. Tanpa menemukan cadangan minyak baru, praktis persediaan minyak di Indonesia hanya bisa bertahan selama 30 tahun (Dartanto, 2005:4).

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa produksi minyak di Indonesia juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Produksi minyak tertinggi di Indonesia pada tahun 1977 yaitu 1686,2 (ribu barel/hari) dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2004 yaitu sebesar 1094,4 (ribu barel/hari). Penurunan ini disebabkan oleh sumur-sumur yang ada sudah tua, teknologi yang digunakan sudah ketinggalan dan iklim investasi di sektor pertambangan minyak kurang kondusif sehingga tidak banyak perusahaan asing maupun nasional melakukan investasi di sektor perminyakan. Sedangkan di sisi konsumsi, konsumsi terhadap produksi minyak/bahan bakar minyak terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Dartanto, 2005:4).

Tabel. 1.1 Kondisi Perminyakan di Indonesia Tahun 2000-2004

Kondisi Perminyakan di Indonesia	2000	2001	2002	2003	2004
Produksi Minyak	1.271,5	1.214,2	1.125,4	1.149,6	1.094,4
Konsumsi Minyak	996,4	1.026	1.075,4	1.112,7	1.143,7
Impor Minyak Mentah	219,1	326	327,7	306,7	330,1
Ekspor Minyak Mentah	622,5	599,2	639,9	433	412,7
Kapasitas Pengilangan	1.057	1.057	1057	1.057	1.055,5
Output Pengilangan	968,2	1.006,1	1.002,4	944,4	1.011,6
Pengilangan Cadangan Minyak	5.123	5.095	4.722	4.320	4.301

Sumber : Dartanto (2005:4)

Kondisi di atas menjelaskan juga bahwa produksi minyak mentah sebanyak 1.125.000 barel per hari yang dibagi menjadi tiga bagian pemerintah sebanyak 663.500 barel atau 58,98% dan kontraktor sebesar 461.500 barel atau 41,02%. Berdasarkan perhitungan tersebut maka minyak mentah yang diterima pemerintah sebesar 656,64 ribu barel per hari ($60\% \times 1094,4$) sedangkan kontraktor 437,76 ribu barel/hari. Bagian minyak KPS diekspor keluar negeri dan semua hasilnya merupakan milik KPS. Berdasarkan UU No.25 tahun 1999 dan UU No.23 tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka hasil minyak yang diperoleh pemerintah pusat harus dibagi dengan daerah penghasil dengan proporsi 85% dan 15%. Maka pemerintah pusat menerima bagian sebesar 558,14 ribu barel/hari dan sisanya milik pemerintah daerah penghasil minyak. Bagian daerah penghasil minyak tidak diberikan dalam bentuk minyak tetapi diberikan dalam bentuk tunai sebesar harga minyak yang ditetapkan dalam APBN. Jadi dasarnya pemerintah pusat mengimpor minyak dari daerah penghasil minyak (Dartanto, 2005:4).

Menurut Mulyani (2008:17), pemerintah harus menghitung ulang besaran asumsi harga minyak dunia sebesar 60 dollar AS per barel yang telah ditetapkan dalam APBN. Asumsi ini akan mempengaruhi setidaknya beberapa komponen dalam APBN

yaitu subsidi BBM, belanja minyak impor, pajak penghasilan migas. Menurut menteri ESDM Yusgiantoro (2005:1) mengatakan bahwa kenaikan harga minyak perlu diwaspadai. Saat ini harga minyak di Indonesia di kisaran 110 dollar AS per barel. Kalau ini bertahan, diperkirakan subsidi BBM sampai pada angka 115 triliun. Menurut Kalla (2008:17), meski subsidi BBM akan membengkak, pemerintah tetap pada kebijakan tidak akan menaikkan harga BBM. Untuk mengurangi tekanan subsidi BBM, pemerintah akan mengurangi subsidi BBM.

Tapi pada kenyataannya, saat ini pemerintah SBY-JK telah melakukan tindakan dengan mengambil kebijakan menaikkan harga BBM secara drastis, sebesar 20%-30%. Bila harga BBM tidak dinaikkan maka pemerintah akan menanggung biaya subsidi BBM yang lebih besar lagi, mengingat harga minyak dunia terus meningkat (Aviliani, 2008:2). Kondisi ini menjadi dilematis bagi pemerintah, apabila subsidi tetap dipertahankan maka akan mengganggu momentum pembangunan ekonomi. Sementara kalau subsidi harus dikurangi maka akan menyebabkan inflasi yang begitu kuat dan akan mempengaruhi daya beli masyarakat (Udiyana, 2008:10).

Bercermin pada pengalaman empiris, kebijakan kenaikan BBM selalu memukul rakyat kecil. Oleh karena itu kenaikan harga BBM harus diiringi dengan program kompensasi yang jelas dan terarah. Ketika pada oktober 2005 lalu, pemerintah menaikkan harga BBM sebesar 10%, sebagian besar rakyat mengecam keputusan pemerintah, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan dengan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) Rp 300.000; per kepala keluarga miskin per bulan. Namun, hal itu dianggap tidak mencukupi untuk mengurangi beban masyarakat. Kenaikan ini dapat menyebabkan daya beli masyarakat melemah dan sulit untuk menggerakkan perekonomian nasional (Kalla, 2008:1).

Alasan pemerintah menaikkan harga minyak di Indonesia adalah : (Dartanto, 2005:6)

1. perbedaan harga jual domestik dengan harga luar negeri sangat timpang akibat peningkatan harga minyak bumi dunia, akibatnya menimbulkan pembengkakan subsidi;

2. penyesuaian harga BBM telah dilakukan oleh hampir semua negara di dunia termasuk negara-negara yang berpenghasilan lebih rendah dari Indonesia seperti Bangladesh atau negara-negara Afrika. Bahkan harga di Timor-Timur yang merupakan negara termiskin di dunia harga domestik BBM jauh di atas harga BBM Indonesia;
3. harga domestik yang terlalu rendah juga mendorong pertumbuhan tingkat konsumsi tinggi. Sementara produksi minyak mentah di Indonesia terus mengalami penurunan. Selain itu perbedaan harga domestik dan internasional mendorong terjadinya penyelundupan;
4. alasan lain yang mendasar adalah menyangkut subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh 40% kelompok teratas termasuk minyak tanah;
5. penyesuaian harga BBM ini memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan lebih banyak program penanggulangan kemiskinan dan pembangunan pedesaan baik yang bersifat investasi jangka panjang maupun pengurangan biaya transaksi dan pengurangan beban keluarga miskin dalam jangka pendek;
6. untuk mengoreksi harga BBM sehingga diharapkan efisiensi penggunaan energi akan tercapai dalam jangka panjang.

Opsi menaikkan harga BBM memang sulit dihindarkan oleh pemerintah karena pilihan itu yang paling memungkinkan di tengah harga minyak dunia yang terus meroket. Untuk membantu masyarakat, pemerintah memberikan bantuan dana subsidi sebesar Rp.187,108 triliun. Dari nilai ini, Rp.126,816 triliun dialokasikan untuk subsidi BBM dan Rp.60,292 triliun untuk listrik. Atas dasar itu penghematan subsidi bisa dilakukan (Mausari, 2008:6).

Setiap tahunnya pemerintah menganggarkan dana ±Rp 50 trilyun untuk mensubsidi BBM : minyak tanah, premium dan solar. Dari ketiga jenis bahan bakar ini, minyak tanah adalah jenis bahan bakar yang mendapat subsidi terbesar (lebih dari 50% anggaran subsidi BBM digunakan untuk subsidi minyak tanah). Dari tahun ke tahun anggaran ini semakin tinggi, karena trend harga minyak dunia yang cenderung meningkat (Sumarno, 2008:1).

Saat ini pemerintah sudah menegaskan akan menarik minyak tanah bersubsidi, sekitar April atau Mei. Tujuannya, untuk memperlancar program konversi dari minyak tanah ke LPG dan menyelamatkan APBN 2008. Alasan pemerintah, harga minyak mentah di pasar dunia yang terus melambung sampai menyentuh angka 112 dollar AS per barel. Hal ini akan membuat angka subsidi membengkak yaitu di atas Rp 100 triliun (Wisnuntoro, 2008:1).

Tabel. 1.2 Subsidi BBM dan LPG RAPBN-P 2008

Subsidi	APBN (Rp/Milyar)	Keputusan Rapat Menkeu 8 Februari 2008
Premium	7.868,52	35.033,83
Minyak Tanah	24.197,11	34.027,90
Minyak Solar	10.020,30	26.930,26
Subtotal BBM	42.085,93	95.992,00
LPG	3.721,44	7.598,56
Total	45.807,37	103.590,55
Kekurangan Subsidi 2007	5.058,52	262.604,23
BBM	4.908,59	2.454,30
LPG	149,93	149,93
Total Subsidi	50.865,89	106.194,78
Target/Asumsi Penghematan		9.497,59

Sumber : Departemen ESDM (Kompas, 2008:1)

Program Konversi Minyak Tanah ke LPG merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi subsidi BBM, dengan mengalihkan pemakaian minyak tanah ke LPG. Program ini diimplementasikan dengan membagikan paket tabung LPG beserta isinya, kompor gas dan aksesorisnya kepada rumah tangga dan usaha mikro pengguna minyak tanah. Untuk mengurangi dampak sosial atas diberlakukannya program ini, pendistribusian LPG dilakukan oleh eks agen dan pangkalan minyak tanah yang diubah menjadi agen dan pangkalan LPG 3 kg. Program ini ditugaskan kepada

Pertamina, berkoordinasi dengan departemen terkait, dan direncanakan pelaksanaannya secara bertahap antara tahun 2007 – 2010 (Aprianto, 2007:1).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan, Abimanyu mengatakan akan segera mempercepat konversi minyak tanah untuk menekan konsumsi BBM. Menurutnya, konversi minyak tanah hingga Juli 2008 masih sekitar 30% dari target 1 juta kiloliter. Itu berarti bisa mengurangi konsumsi minyak tanah, karena yang paling besar subsidiya adalah minyak tanah. Secara teori, pemakaian 1 liter minyak tanah setara dengan pemakaian 0,57 kg LPG. Dengan menghitung berdasarkan harga keekonomian minyak tanah dan LPG, subsidi yang diberikan untuk pemakaian 0,57 kg LPG akan lebih kecil daripada subsidi untuk 1 liter minyak tanah. Secara nasional, jika program konversi minyak tanah ke LPG berhasil, maka pemerintah akan dapat menghemat 15-20 Trilyun subsidi BBM per tahun. Manfaat lain yang dapat diperoleh dari konversi minyak tanah ke LPG adalah : (Abimanyu, 2008:1)

1. mengurangi kerawanan penyalahgunaan minyak tanah;
2. mengurangi polusi udara di rumah/dapur;
3. menghemat waktu memasak dan perawatan alat memasak;
4. dapat mengalokasikan minyak tanah untuk bahan bakar yang lebih komersil (misalnya bahan bakar pesawat/avtur);
5. meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pemerintah menargetkan, dalam tiga sampai empat tahun ke depan setidaknya 80% konsumsi minyak tanah dapat dialihkan ke LPG. Program konversi minyak tanah ke LPG merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM yang cenderung terus meningkat jumlahnya. Dengan pengalihan tersebut diharapkan terjadi penurunan anggaran subsidi BBM, mengingat subsidi LPG lebih rendah dibanding dengan subsidi minyak tanah. Disamping itu, LPG adalah energi yang bersih dan ramah lingkungan (Abimanyu, 2008:2)

Kebijakan menaikkan harga BBM ini memang merupakan pukulan tersendiri bagi masyarakat di Kabupaten Indramayu, karena minyak tanah yang semakin langka dan pemerintah telah mencanangkan program konversi minyak tanah ke LPG secara

menyeluruh di Kabupaten Indramayu. Penelitian ini menggunakan objek pada konsumsi LPG di Kabupaten Indramayu, karena (1) Kabupaten Indramayu mengalami kelangkaan minyak tanah secara terus menerus (2) pemerintah Jawa Barat bekerjasama dengan Pertamina Balongan di Kabupaten Indramayu melakukan program konversi minyak tanah ke LPG secara menyeluruh (3) melihat seberapa besar pengaruh kenaikan harga BBM terhadap konsumsi LPG di Kabupaten Indramayu.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini berjudul Pengaruh Kenaikan Harga BBM terhadap Konsumsi LPG di Kabupaten Indramayu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah :

1. seberapa besar pengaruh antara tingkat harga minyak tanah dengan konsumsi LPG di Kabupaten Indramayu sebelum dan setelah kenaikan harga BBM?
2. seberapa besar pengaruh antara pendapatan dengan konsumsi LPG di Kabupaten Indramayu sebelum dan setelah kenaikan harga BBM?
3. seberapa besar pengaruh antara tingkat harga LPG dengan konsumsi LPG di Kabupaten Indramayu sebelum dan setelah kenaikan harga BBM?
4. apakah ada perbedaan yang nyata antara konsumsi LPG di Kabupaten Indramayu sebelum dan setelah kenaikan harga BBM?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. mengetahui besarnya pengaruh tingkat harga minyak tanah terhadap konsumsi LPG di Kabupaten Indramayu sebelum dan setelah kenaikan harga BBM;
2. mengetahui besarnya pengaruh pendapatan terhadap konsumsi LPG di Kabupaten Indramayu sebelum dan setelah kenaikan harga BBM;

3. mengetahui besarnya pengaruh tingkat harga LPG terhadap konsumsi LPG di Kabupaten Indramayu sebelum dan setelah kenaikan harga BBM;
4. mengetahui perbedaan yang nyata antara konsumsi LPG sebelum dan setelah kenaikan harga BBM di Kabupaten Indramayu.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. sebagai gambaran dan informasi tentang pengaruh kenaikan harga BBM terhadap konsumsi LPG di Kabupaten Indramayu;
2. bagi pemerintah dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengaruh kenaikan harga BBM terhadap konsumsi LPG di daerah tersebut;
3. bagi pembaca dan peneliti selanjutnya dapat sebagai referensi yang menggunakan objek yang sama;
4. bagi masyarakat dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam mengkonsumsi LPG.